

BI Perkirakan Inflasi Juni 0,45%

Oleh **Triyan Pangastuti**

► **JAKARTA** – Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi pada Juni 2019 berada di kisaran 0,45% secara bulanan atau 3,21% secara tahunan. Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya (Mei) yang tercatat sebesar 0,68%. Laju inflasi yang rendah tersebut mengindikasikan bahwa inflasi terkendali.

"Berdasarkan survei pemantauan harga minggu terakhir, inflasi di 0,45% month to month dan jatuh di 3,21% year on year. Artinya, memang inflasi masih cukup terjaga, daya beli masyarakat terjaga," jelas Deputy Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo, di Jakarta, Jumat (8/6).

Dody mengatakan, penyebab inflasi Juni tak berbeda jauh dengan penyebab inflasi pada bulan sebelumnya, yaitu terkait dengan

hari raya Idul Fitri yang disumbang oleh beberapa komoditas seperti cabai merah dan angkutan dalam kota. Meski demikian kedua komoditas trennya kearah menurun.

"Beberapa penyebab inflasi masih terbawa dari bulan lalu seperti cabai, angkutan dalam kota. Tapi semuanya ke arah tren menurun," ujarnya.

Untuk perkembangan laju inflasi kedepan, BI meyakini bahwa inflasi hingga akhir tahun akan

terkendali sesuai dengan kisaran target BI, bahkan akan berada dibawah titik tengah 3,5%.

"BI cukup optimistis bahwa inflasi sampai akhir tahun akan masuk dalam range, bahkan di bawah target 3,5%, yang berarti daya beli masyarakat tetap terjaga," kata dia.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan pada Mei 2019 sebesar 0,68% atau 1,48% secara tahun kalender, sedangkan secara tahunan, inflasi Mei tercatat 3,32%.

Adapun penyumbang inflasi yang terjadi saat Ramadan itu utamanya dipengaruhi oleh harga bahan makanan dan angkutan. Dengan kontribusi dari bahan makanan mengalami inflasi 2,02% dan berkontribusi 0,43% terhadap keseluruhan inflasi Mei. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi seperti cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, ikan segar, kelapa, pepaya, dan lainnya.

Sedangkan, laju inflasi pada Juni 2018 tercatat sebesar 0,59% karena didorong oleh kenaikan harga bahan makanan seperti ikan segar dan daging ayam ras.

Perketat Koordinasi
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiwo mengatakan, BI akan terus perketat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk membawa inflasi dalam tren menurun, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif.

Ada tiga langkah strategis yang disepakati untuk menjaga inflasi 2019 tetap berada dalam kisaran sasarannya adalah menjaga inflasi dalam kisaran sasaran, terutama ditopang pengendalian inflasi *volatile food* maksimal di kisaran 4-5%. Strategi ini dilakukan melalui empat kebijakan utama (4K) terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Kemudian, sesuai dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021, kebijakan ditempuh dengan memberikan prioritas kepada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, yang didukung oleh ekosistem yang lebih kondusif serta ketersediaan data yang akurat.

MENANTI KESEPAKATAN KTT G-20

BI Harapkan Hasil Positif Terkait Perang Dagang

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengharapkan ada hasil positif dari pertemuan antara kepala negara dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Osaka, Jepang.

Deputy Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menuturkan, jika ada kesepakatan yang positif dari G-20, maka akan langsung memperbaiki perekonomian global, termasuk perdagangan dan ekspor negara-negara emerging market termasuk Indonesia.

Lantaran saat ini beberapa negara emerging telah terkena dampak dari melambatnya ekspor termasuk Indonesia, sehingga jika arah kesepakatannya positif maka dapat membantu kinerja ekspor dan mendorong kembali permintaan domestik yang membaik seperti konsumsi dan investasi.

"Tentu harapannya masih 50:50, masih melihat skenario trade war, masih prolog. Tentunya dalam perkembangan terakhir positif juga muncul bahwa kemungkinan akan ada deal yang mengarah ke penyelesaian" ujar Dody di Gedung BI, Jumat (28/6).

Oleh karena itu, BI masih melihat data globalnya, yang masih menunjukkan arah yang belum meningkat. Menurut Dody jika tidak terjadi kesepakatan seperti se-

belumnya, maka tidak menutup kemungkinan negara-negara di dunia akan terkena dampak, terutama negara emerging market dimana nilai tukarnya bisa melemah.

"Saya lihat semua global ya (terdampak), dengan hasil yang pesimis maka semua akan kena. Emerging currency-nya akan terkena dampak, termasuk rupiah," ujar Dody.

Dihubungi secara terpisah, Dody menegaskan bahwa ketegangan hubungan dagang makin nyata sehingga menurunkan volume perdagangan dunia, bahkan memperlambat pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara. Selain itu, juga mendorong sejumlah bank sentral negara lain menerapkan kebijakan moneter yang longgar.

"Perkembangan ekonomi dunia memberikan tantangan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga arus masuk modal asing ke Indonesia. Lantaran mempertimbangkan tekanan eksternal dan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan di domestik," jelasnya kepada *Investor Daily*, pekan lalu.

Untuk memitigasi dampak perang dagang, BI melakukan berbagai langkah kebijakan yakni mempertahankan suku bunganya (di level 6%) dan terus mencermati kondisi pasar keuangan Indonesia. (try)

Perang Dagang Dapat Turunkan Pertumbuhan Ekonomi Dunia 0,5%

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, kondisi perekonomian 2019 akan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya risiko negatif yang sudah terjadi dari tahun sebelumnya. Salah satunya eskalasi ketegangan perdagangan terutama antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok serta munculnya proteksionisme.

Bila perang dagang ini berlanjut, maka akan berakibat langsung terhadap pertumbuhan perekonomian dunia. Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde menyebutkan pertumbuhan perekonomian dunia akan menurun hingga 0,5% jika perang dagang terus berlanjut. Dampak penurunan ini merupakan risiko besar bagi dunia, karena 0,5% pertumbuhan ekonomi dunia bernilai lebih besar dari satu perekonomian negara, seperti negara Afrika Selatan.

"Tahun ini sudah 3,5% dan tahun depan diharapkan lebih baik mencapai 3,6%. Jika perang dagang ini terus berjalan maka pertumbuhannya hanya akan mencapai 3,1%. Sebesar 0,5% GDP dunia nilainya lebih besar dari satu ekonomi seperti Afrika Selatan, risikonya sangat besar," kata Sri Mulyani yang mengutip Christine Lagarde dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (30/6).

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menilai, perekonomian global di tahun ini sebenarnya relatif lebih terjaga dari 2018. Saat itu tekanan ekonomi terjadi karena kenaikan harga minyak dunia, kenaikan suku bunga The Fed, dan perang dagang. Sedangkan tekanan perekonomian global tahun ini lebih terpengaruh perang dagang. "Pemerintah tetap mengantisipasi perkembangan yang terjadi," tutur Erani saat dihubungi, Jumat (28/6).

Lebih jauh Erani mengatakan, pemerintah terus memacu kinerja ke negara-negara non tradisional, misalnya ke Peru. Indonesia mengekspor biodiesel, kendaraan penumpang, alas kaki, mesin cetak, mesin industri baja, tekstil, dan produk kertas ke Peru.

Pada 2018, total perdagangan Indonesia dengan Peru surplus US\$ 278 juta, naik 21% (yoy). Neraca perdagangan non migas surplus US\$ 165 juta, naik 60% (yoy). Selain Peru, perdagangan Indonesia-Italia juga tumbuh membaik. Pada Mei 2019, ekspor Indonesia ke Italia naik 35% (mom).

"Komoditas yang mendominasi perdagangan Italia dan Indonesia yaitu besi dan baja, produk kimia, alas kaki, karet, rempah-rempah, kopi, dan teh. Sementara itu, pertumbuhan ekspor Indonesia ke Tiongkok dan Amerika masing-masing 7% (mom) dan 12% (mom)," jelas Erani.

Menurutnya, produk-produk Indonesia memiliki daya saing yang cukup tinggi. Hal itu dapat dilihat dari pengukuran daya saing (Revealed Comparative Advantage/RCA). Beberapa produk yang memiliki RCA tinggi adalah kelapa sawit, alas kaki, kopi, teh, dan rempah-rempah. "Kami terus memaksimalkan penetrasi produk-produk tersebut di pasar global," imbuh Erani.

Indonesia sendiri memiliki peluang besar dari perang dagang antara AS-Tiongkok, khususnya relokasi industri. Dari sisi insentif, pemerintah telah menge-

luarkan beberapa regulasi. Insentif fiskal terbaru yaitu super deduction tax, yang menawarkan pemotongan PPh hingga di atas 100%.

"Selain alasan tersebut, peluang Indonesia menjadi negara tujuan relokasi industri adalah kapasitas pasar yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa, Indonesia memiliki kekuatan konsumsi yang menjadi daya tarik bagi industri," kata Erani.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, selama Indonesia tidak terlibat langsung dalam upaya kenaikan tarif dagang, maka dampak perang dagang bisa dijaga.

"Ya memang namanya juga perang, jadi mereka eskalasi menambah pembatasan perdagangan terus. Tetapi sudahlah, kita tidak ikut perang dagang, kenapa jadi pusing?" ucap Darmin.

Ia mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan jumlah investasi dan ekspor. Pemerintah terus berupaya agar dua sektor ini menjadi motor utama mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

"Bagaimana menarik orang agar datang investasi ke sini supaya mereka tidak kena urusan perang dagang," kata Darmin.

Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Hendri Saparini mengatakan, Indonesia memiliki potensi pasar domestik. Jika hal ini berdampak ke ekspor dan impor maka harus terus didorong untuk meningkatkan laju perekonomian domestik. "Pasar domestik harus dioptimalkan agar dampak perang dagang bisa ditekan," ucap Hendri.

Disamping meningkatkan ekspor dan menekan impor, pemerintah juga harus melakukan langkah khusus. Jika dilihat harga tanah dan upah buruh di Vietnam sudah meningkat pesat. Hal ini seharusnya menjadi peluang bagi Indonesia. Pemerintah bisa mengajak investor masuk ke sektor-sektor yang belum ada di dalam negeri. Pemerintah harus punya strategi yang lebih konkrit baik untuk perdagangan maupun investasi.

"Tidak hanya sekedar kemudahan pajak tetapi insentif apa yang diberikan untuk sektor-sektor tertentu. Nggak bisa insentif yang berjenis broad base lagi," tutur Hendri.

Jika insentif yang diberikan masih bersifat general maka kebijakan tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Justru hal ini berdampak kontraproduktif untuk perekonomian. Misalnya saat industri semen mengalami kelebihan produksi tetapi pemerintah justru melakukan impor.

"Kalau di Indonesia dimana mereka bisa mengisi alur value chain agar industri kita juga bisa berkembang," ucap Hendri.

Lobi Perusahaan Besar
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro mengatakan, guna memanfaatkan perang dagang sebaiknya pemerintah memperbaiki iklim usaha. Pemerintah perlu melakukan pendekatan pribadi ke perusahaan besar. Bila perlu membentuk satuan tugas khusus yang bertugas untuk melobi ke perusahaan besar. Hal ini dilakukan agar perusahaan tersebut mau melakukan relokasi ke Indonesia. (ark)

ti.phone

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk. Berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2019
Waktu : Pukul 09.51 WIB s/d 10.40 WIB
Tempat : Sky Lounge Lantai 19, Grand Mercure Harmoni Jalan Hayam Wuruk No.36-37, Jakarta

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut :

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengurusan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018;
- Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- Perubahan susunan pengurus Perseroan.

B. RUPST dipimpin oleh Bapak Herlanto Anggono selaku Komisaris Perseroan dan dihadiri oleh :

- Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| DIREKSI : | |
| Direktur Utama | : Ibu TAN LIE PIN |
| Direktur | : Ibu MEIJATY JAWIDJAJA |
| Direktur | : Bapak ANDRY RYANTO |
| Direktur | : Bapak RUKMONO CAHYADI |
| Direktur Independen | : Bapak GATOT BEKTI HARYONO |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| DEWAN KOMISARIS : | |
| Komisaris Utama | : Bapak HENGGY SETIAWAN |
| Komisaris | : Bapak MOHAMMAD FIRDAUS |
| Komisaris Independen | : Bapak LUKMAN HADIKUSUMO |
| Komisaris Independen | : Bapak ACHMAD HERLANTO ANGGONO |

- Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak **6.654.949.547** saham atau mewakili **91,03%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

C. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/ atau Pendapat

Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam RUPST tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat setiap mata acara RUPST. Namun dalam RUPST tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara RUPST.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPST dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

E. Hasil Pengambilan Keputusan dalam RUPST

| Mata Acara | Tidak Setuju | Abstain | Setuju |
|------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Pertama | Nihil | 3.562.599 (0,05%) | 6.651.387.047 (99,95%) |
| Kedua | Nihil | | 6.654.949.547 (100%) |
| Ketiga | 88.480.100 (1,33%) | 3.562.500 (0,05%) | 6.562.906.947 (98,62%) |
| Keempat | Nihil | | 6.654.949.547 (100%) |
| Kelima | 145.731.300 (2,183%) | Nihil | 6.509.218.247 (97,817%) |

F. Hasil Keputusan RUPST sebagai berikut :

- Mata Acara Rapat Pertama :**
Menyetujui dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengurusan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018
- Mata Acara Rapat Kedua :**
Menyetujui Penetapan Penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu digunakan untuk :
 - Diabagikan sebagai Dividen Tunai senilai Rp. 6,- (Enam Rupiah) untuk setiap lembar saham kepada para pemegang saham Perseroan.
 - Sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - Sisa laba bersih akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.
- Mata Acara Rapat Ketiga :**
 - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019;
 - Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usulan dari Direksi, untuk menetapkan persyaratan penunjukannya yang wajar serta
 - menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
- Mata Acara Rapat Keempat :**
 - Menyetujui memberikan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris untuk tahun 2019 dengan kenaikan setinggi-tingginya 5% dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.
 - Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.
- Mata Acara Rapat Kelima :**
 - Menyetujui untuk menghentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditetapkannya Rapat ini, kecuali Bapak Hengky Setiawan dan Bapak Ferry Setiawan yang masa jabatannya baru akan berakhir pada RUPS Tahunan tahun 2023, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) selama menjalankan jabatannya, sepanjang tercermin dalam laporan Keuangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan.

- Menyetujui untuk memberitahukan dengan hormat Bapak Rukmono Cahyadi selaku Direksi Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) selama menjalankan jabatannya, sepanjang tercermin dalam laporan Keuangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa mereka selama ini untuk kemajuan Perseroan.
- Menyetujui untuk :

- Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu Bpk. Mohammad Firdaus sebagai Komisaris, Bpk. Herlanto Anggono sebagai Komisaris Independen, dan Bpk. Lukman Hadikusumo Komisaris Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditetapkannya Rapat ini sampai dengan ditetapkannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024.
- Mengangkat kembali Bpk. Rukmono Cahyadi sebagai Direktur untuk masa jabatan terhitung sejak ditetapkannya Rapat ini sampai dengan ditetapkannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020.

- Menetapkan sejak ditetapkannya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PerseroanSehingga sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------|---|
| DEWAN KOMISARIS : | |
| Komisaris Utama | : Bapak HENGGY SETIAWAN, dengan masa jabatan sampai tahun 2023; |
| Komisaris | : Bapak FERRY SETIAWAN, dengan masa jabatan sampai tahun 2023; |
| Komisaris | : Bapak MOHAMMAD FIRDAUS, dengan masa jabatan sampai tahun 2024; |
| Komisaris Independen | : Bapak LUKMAN HADIKUSUMO, dengan masa jabatan sampai tahun 2024; |
| Komisaris Independen | : Bapak ACHMAD HERLANTO ANGGONO, dengan masa jabatan sampai tahun 2024; |

- | | |
|---------------------|---|
| DIREKSI : | |
| Direktur Utama | : Ibu TAN LIE PIN, dengan masa jabatan sampai tahun 2023; |
| Direktur | : Ibu MEIJATY JAWIDJAJA, dengan masa jabatan sampai tahun 2023; |
| Direktur | : Bapak ANDRY RYANTO, dengan masa jabatan sampai tahun 2023; |
| Direktur | : Bapak RUKMONO CAHYADI, dengan masa jabatan sampai tahun 2020; |
| Direktur Independen | : Bapak GATOT BEKTI HARYONO, dengan masa jabatan sampai tahun 2023; |

- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

G. Jadwal Dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Jadwal Pembayaran Dividen :**

| | |
|--|------------------------|
| Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : Jum'at, 5 Juli 2019 |
| Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : Senin, 08 Juli 2019 |
| Cum Dividen di Pasar Tunai | : Selasa, 09 Juli 2019 |
| Ex Dividen di Pasar Tunai | : Rabu, 10 Juli 2019 |

Recording Date (Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen) : Selasa, 09 Juli 2019
Pembayaran Dividen Tunai : Rabu, 31 Juli 2019
- Ketentuan tentang Pembayaran Dividen adalah sebagai berikut :**
 - Dividen tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan Pukul 16.00 WIB;
 - Bagi Para Pemegang Saham yang sahnya di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka pembayaran dividen akan dilakukan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang Rekening di KSEI;
 - Pembagian dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Para Pemegang Saham yang bersangkutan, serta dipotong dar jumlah dividen tunai yang menjadi hak Para Pemegang Saham yang bersangkutan. Bukti dari pemotongan pajak tersebut dapat diambil di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT. SINARTAMA GUNITA, Sinar Mas Land Plaza, Menara I, Lt. 9, Jalan MH. Thamrin No. 51, Telp (021) 3922332, Fax (021) 3923003.
 - Bagi Para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 09 Juli 2019 Pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPH sebesar 30%.
 - Bagi Para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang tata cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di KSEI sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No. SE-001/DIR-eks/0110, tanggal 11 Januari 2010. SKD dapat diserahkan ke KSEI paling lambat pada tanggal 09 Juli 2019 Pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 01 Juli 2019
PT. TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk.
Direksi

MUFG Bank – Cabang Jakarta
A Member of MUFG, a global financial group

Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate)
MUFG Bank
Tanggal 28 Juni 2019 (% per tahun)

| | Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) | | | |
|---|--|--------------|-----------------|---|
| | Berdasarkan Segmen Bisnis | | | |
| | Kredit Korporasi | Kredit Ritel | Kredit Konsumsi | |
| KPR | | | NON KPR | |
| Suku Bunga Dasar Kredit (prime lending rate) | 8,25% | - | - | - |

Keterangan:
a. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ini belum memperhitungkan komponen premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap risiko masing-masing debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.
b. Dalam Kredit Konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan.
c. Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau website Bank dalam hal bank memiliki website.